

Analisis Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi Di Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Redo Saputro¹ Dan Martina Ayu Sejati²

¹Institut Teknologi PLN, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Jakarta, Indonesia 11750

²Universitas Nusa Cendana, Jl. Matani Raya, Lasiana, Kec. Klp. Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia 85228

***E-mail:** redo@itpln.ac.id

Received: 19 02 2024 / *Accepted:* 28 11 2024 / *Published online:* 30 01 2025

ABSTRAK

Sektor sosial dan ekonomi merupakan sektor yang perlu diperhatikan dalam penilaian tingkat perkembangan suatu wilayah. Provinsi Bengkulu berada di pesisir barat dari pulau Sumatera, berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 0,47%, kontribusi yang relatif kecil tidak mencapai 1%. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu, dengan melihat dari sektor sektor sosial dan ekonomi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkatan perkembangan wilayah, kemudian analisis deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang terjadi terkait dengan tingkatan perkembangan wilayah di Provinsi Bengkulu. Hasil analisis tingkat perkembangan wilayah dari sektor sosial di Provinsi Bengkulu, menunjukkan sebagian besar berada di kualifikasi tinggi (wilayah maju). Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan terkait sektor sosial di Provinsi Bengkulu sudah cukup merata, hanya wilayah Kabupaten Lebong yang memiliki tingkatan klasifikasi rendah (tertinggal). Berbeda dengan sektor ekonomi, yang menunjukkan hasil sebagian besar wilayah di Provinsi Bengkulu di tingkatan klasifikasi rendah (wilayah tertinggal), hanya Kota Bengkulu yang berada di tingkatan tinggi, dan Kabupaten Bengkulu Utara dengan tingkatan sedang (berkembang). Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu memperhatikan lebih lanjut terkait perkembangan wilayah dengan klasifikasi rendah (tertinggal), terutama di Kabupaten Lebong, yang mana Kabupaten Lebong berada di kalsifikasi rendah (tertinggal), terutama pada sektor sosial, dan ekonomi.

Kata Kunci: Tingkat Perkembangan Wilayah, Sosial, Ekonomi

ABSTRACT

The social and economic sectors are need to be considered in assessing the level of development of a region. Bengkulu Province located on the west coast of the island of Sumatra has a contribution to Indonesia's GDP of 0.47%, which is a relatively small contribution of less than 1%. This aim of research is knowing the level of regional development in Bengkulu Province, by examining the social and economic sectors. The method is descriptive quantitative, quantitative analysis is used to analyze the level of regional development; then descriptive analysis is used to explain the phenomena that occur related to the level of regional development in Bengkulu Province. The level of regional development from the social sector, shows that most of them are in high qualifications (developed regions), this concludes that development related to the social sector is quite evenly distributed, only Lebong regency has a low classification level (underdeveloped) in contrast to the economic sector. That occurs in Bengkulu Province is mostly at the low classification level (underdeveloped regions), only Bengkulu City which is at high level, and North Bengkulu Regency with a medium level (developed). The Bengkulu Provincial

Government needs to pay attention of areas with low classification (underdeveloped), especially in Lebong Regency with low classification (underdeveloped) in the social and economic sectors.

Keywords: *Regional Development Level, Social, Economic*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia telah mengalami banyak dinamika perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya (Endah, 2020). Beberapa dasawarsa belakangan ini, pemerintah menerapkan model pembangunan yang menekankan pada nilai atau laju dari pertumbuhan ekonomi khususnya pendapatan perkapita (Suhendra et al., 2020). Penerapan dengan cara atau model tersebut, didasari dari adanya proses modernisasi pada seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Proses pembangunan tidak pernah lepas dari pemanfaatan akan potensi yang dimiliki setiap wilayah, potensi-potensi tersebut, seperti; sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga potensi sumber daya buatan seperti infrastruktur (Saleh et al., 2020). Potensi di setiap wilayah pastilah berbeda-beda (tidak ada yang sama), wilayah yang memiliki sumber daya yang memadai, maka perkembangan wilayahnya akan semakin tinggi atau baik, berbeda dengan wilayah yang tidak memiliki sumber daya, maka perkembangan wilayahnya akan relatif lambat dan stagnan. (Todaro, dalam Redo 2022). Pembangunan pada umumnya memiliki beberapa tujuan atau arahan utama, diantaranya yaitu: meningkatkan standar kehidupan masyarakat, mempermudah masyarakat dalam berkegiatan, baik di sektor ekonomi, maupun juga di sektor sosial. Keberhasilan dari sebuah proses pembangunan dapat dilihat dari beberapa faktor atau indikator, seperti: Pendapatan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan

kehidupan masyarakat (Setianingtiyas et al., 2019).

Menurut Aziza & Srimarchea (2023) bahwa persebaran wilayah dengan perkembangan tinggi (maju) yang ada di Indonesia masih terkonsentrasi/terpusat di pulau Jawa. Pulau Jawa masih menjadi pusat dari berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari sisi pendapatan ekonomi (kontribusi). Badan pusat statistik Indonesia pada tahun 2023, tentang produk domestik bruto (PDB), menunjukkan bahwa pulau Jawa memiliki kontribusi sebesar 57,27%, yang kemudian diikuti oleh pulau Sumatera dengan besaran 21,94%, lalu diikuti dari pulau Kalimantan 8,32%, 7,13% dari pulau Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara 2,77%, dan terakhir dari pulau Papua dengan kontribusi sebesar 2,57%. Pulau Jawa dengan 57,27% menandakan sebagian besar bahkan setengah dari keseluruhan pendapatan di Indonesia berasal dari pulau Jawa.

Provinsi Bengkulu dilihat dari sisi sektor ekonomi pada data BPS 2023, memiliki kontribusi sebesar 0,47% terhadap PDB Indonesia. Kontribusi ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut berada pada urutan terakhir di pulau Sumatra, yang mana kontribusi terbesar di Pulau Sumatra berasal dari Provinsi Riau 5,18%, dan disusul dengan Provinsi Sumatera Utara 4,99%. Kontribusi PDRB Provinsi Bengkulu yang hanya 0,47% tidak mencapai angka 1% dalam kontribusi PDB Indonesia pada tahun 2023, menandakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan di wilayah Provinsi Bengkulu masih cukup tertinggal. Menurut Redo (2022), menyatakan beberapa penyebab ketertinggalan dari Provinsi

Bengkulu, diantaranya bentuk wilayah dari Provinsi Bengkulu berupa *Elongated Region (long and narrow in shape)*. Wilayah berbentuk memanjang dan secara geografis berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, menyebabkan jarak antara wilayah menjadi relatif jauh dan hanya bisa diakses dengan mudah apabila menggunakan transportasi darat. Kemudian Provinsi Bengkulu adalah wilayah *landlock* atau wilayah yang terkunci, dan terakhir karena faktor bencana, Provinsi Bengkulu menjadi wilayah aktif terhadap bencana gempa bumi dengan potensi tsunami serta banjir (StiRRRD, 2015).

Meskipun banyak penelitian yang telah mengkaji pembangunan ekonomi di Indonesia, masih terdapat gap penelitian khususnya dalam memahami tingkat perkembangan wilayah di Provinsi Bengkulu berdasarkan sektor ekonomi dan sosial. Penelitian ini akan berkontribusi dengan melakukan analisis lebih mendalam menggunakan teknik *scaling* untuk mengidentifikasi perkembangan wilayah berdasarkan data-data dari sektor sosial dan ekonomi. Hal ini penting mengingat keterbatasan geografis dan tantangan unik yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu, yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Penjelasan terkait beberapa permasalahan yang terjadi di Provinsi Bengkulu terkait dengan pembangunan serta perkembangan wilayah melandasi perlunya kajian terkait analisis lebih lanjut terkait tingkat perkembangan wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah yang terjadi di Provinsi Bengkulu berdasarkan sektor ekonomi dan sektor sosial. Proses penilaian tingkat perkembangan wilayah dengan menggunakan data ekonomi dan

sosial, yang kemudian diolah dengan teknik *scaling*, agar dapat diidentifikasi perkembangan wilayah yang terjadi di Provinsi Bengkulu.

METODE PENELITIAN

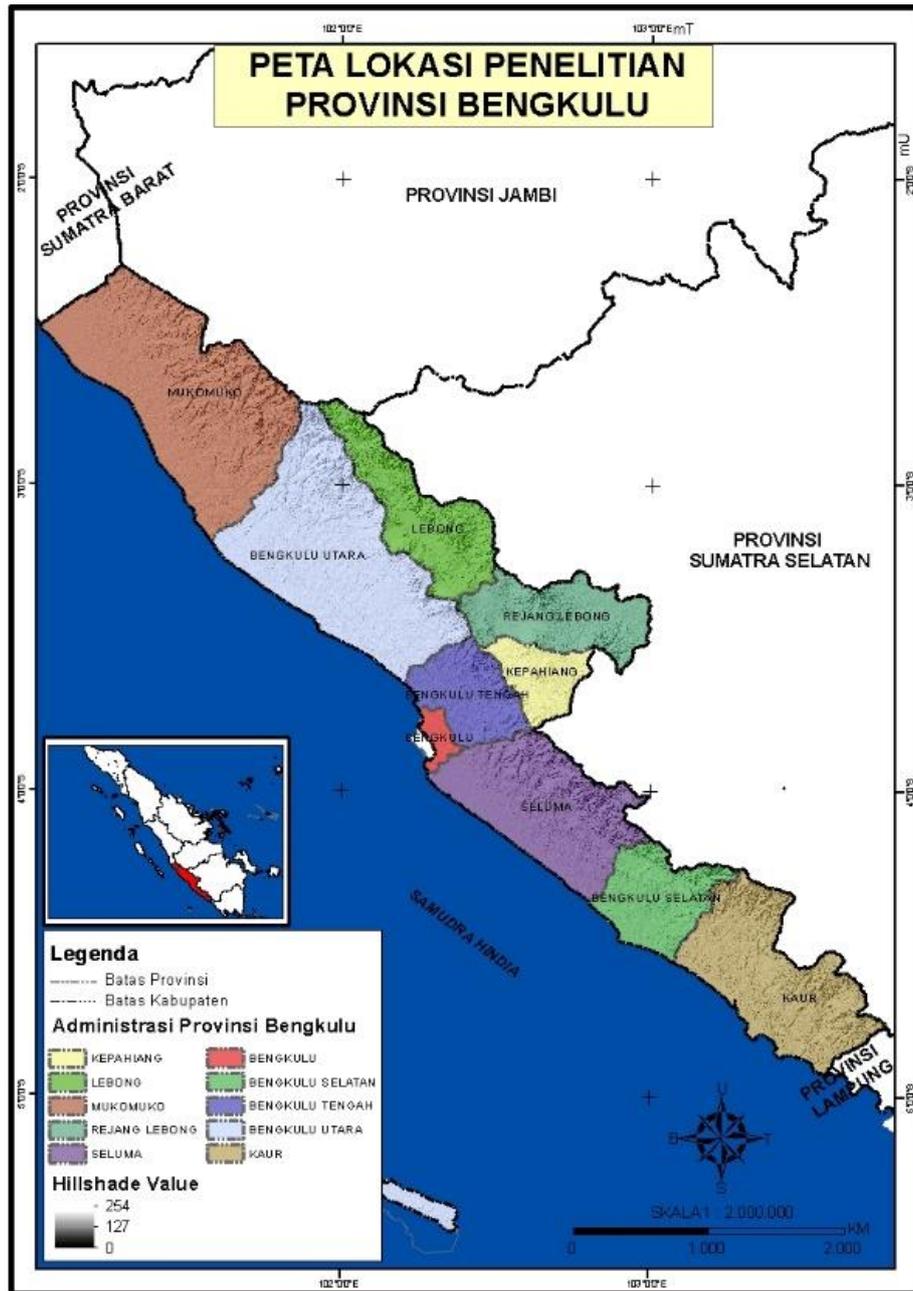
Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, serta menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi, dan direpresentasikan dengan hasil berupa peta (spasial). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah yang terjadi di Provinsi Bengkulu, terutama dari sektor ekonomi dan sosial, sedangkan untuk deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Provinsi Bengkulu terkait dengan perkembangan wilayah.

Penskalaan (*Scaling*) merupakan penyamaan satuan dengan memposisikan nilai tertinggi dan terendah kemudian mengkali hasil tersebut dengan nilai 100, sehingga hasil yang diperoleh dengan satuan (range) yang sama, dan nilai 0-100. Rumus yang digunakan pada penskalaan menurut Muta'ali (2015) Persamaan 1:

$$S = [(R-Rr)/(Rt-Rr)] \times 100 \quad (1)$$

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Bengkulu, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2023. Provinsi Bengkulu yang letaknya terbentang memanjang dari perbatasan Provinsi Lampung pada bagian selatan, hingga Provinsi Sumatera Barat di bagian utara. Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 wilayah Kabupaten dan 1 Kotamadya, dengan luas total 19.919,33 km². Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 mencapai ±2 juta jiwa. Terkait dengan lokasi penelitian, dapat dilihat secara rinci di Gambar 1



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Alat dan Bahan

Pada penelitian ini menggunakan alat dan bahan yang disajikan pada Tabel 1. Data-data sekunder yang diperoleh dari instansi badan pusat statistik Indonesia dan juga badan pusat statistik Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan seperti, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu, PDRB Bengkulu, kondisi sosial (jumlah penduduk, kepadatan, laju pertumbuhan, penduduk tidak miskin), dan juga hal yang

penting terkait dengan investasi di Provinsi Bengkulu (Tabel 2).

Tabel 1. Alat dan Bahan Penelitian

| No | Alat dan Bahan | Tahun |
|----|----------------------------------|-----------|
| 1 | Peta Administrasi | Terbaru |
| 2 | Data Sekunder | 2023 |
| 3 | RPJMD Provinsi | 2019-2024 |
| 4 | Perangkat Lunak <i>ArcGIS</i> | |

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif sederhana, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi Badan Pusat Statistik dengan tahun dasar yaitu 2023 yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik *scaling*, untuk menentukan perkembangan wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu dari sektor ekonomi dan sosial. Deskriptif untuk menjelaskan fenomena tingkatan perkembangan wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu.

Metode Pengumpulan, Pengolahan, Dan Analisis Data

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi melalui input data sekunder, kemudian mencari berbagai informasi/referensi yang sesuai dengan terkait dengan penelitian dari studi literatur. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan perangkat komputer dan aplikasi pengolahan, seperti; Microsoft excel, word dan ArcGIS untuk proses pengolahan peta (spasial).

Tabel 2. Sumber Data, Metode, dan Unit Analisis

| No | Jenis Data | Sumber Data | Metode | Unit Analisis |
|----|--|---|---|----------------|
| 1 | Fasilitas Sosial a. Jumlah Penduduk b. Kepadatan Penduduk c. Laju Pertumbuhan d. Penduduk tidak miskin e. Rata-rata lama sekolah f. Indeks pembangunan manusia g. Angka melek huruf h. Angka harapan hidup | Badan Pusat Statistik dan Bappeda Provinsi Bengkulu | Penyusunan indeks perkembangan wilayah dengan menggunakan teknik <i>Scaling</i> | Kabupaten/Kota |
| 2 | Fasilitas Ekonomi a. PDRB daerah b. Laju pertumbuhan ekonomi c. Daya beli masyarakat d. Tingkat partisipasi angkatan kerja e. Rata-rata gaji/upah f. Tenaga kerja non pertanian g. Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB h. Pendapatan anggaran daerah | Badan Pusat Statistik dan Bappeda Provinsi Bengkulu | teknik <i>Scaling</i> | Kabupaten/Kota |
| 3 | Statistik Keuangan Provinsi Bengkulu | Bappeda dan Badan Keuangan Daerah | teknik <i>Scaling</i> | Kabupaten/Kota |
| 4 | Penanaman Modal (Investasi) | Badan Keuangan Daerah | teknik <i>Scaling</i> | Kabupaten/Kota |
| 5 | Peta Administrasi | Bappeda dan BIG | teknik <i>Scaling</i> | Kabupaten/Kota |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor pembangunan yang menjadi konsentrasi dalam penelitian ini terdiri dari dua sektor utama (sosial dan ekonomi), karena kedua sektor tersebut merupakan sektor penting dalam menyumbangkan pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu secara keseluruhan. Data-data yang

berkaitan dengan sektor sosial dan ekonomi, diolah atau diukur dengan menggunakan teknik perhitungan penskalaan *scaling*, dengan hasil yang diperoleh berupa hasil rentan nilai dari 0-100, kemudian berdasarkan hasil-hasil tersebut, dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan

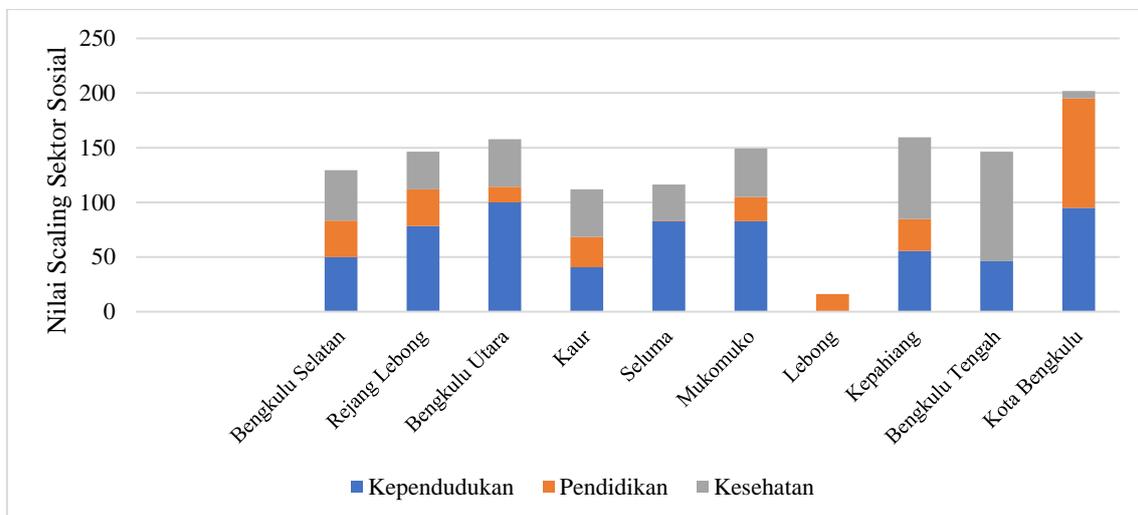
klasifikasi pembangunan wilayah, seperti; perkembangan wilayah tinggi, dengan karakter yang sudah maju, kemudian perkembangan wilayah sedang atau berkembang, dan tingkatan klasifikasi terakhir adalah rendah, atau perkembangan wilayah masih tertinggal.

Sektor sosial berkaitan erat dengan dimensi kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat pada 3 indikator utama, diantaranya yaitu; indikator Kependudukan (Jumlah penduduk, laju pertumbuhan, jumlah penduduk tidak miskin), kemudian indikator Pendidikan (rata-rata lama sekolah, angka melek huruf) dan indikator Kesehatan (angka harapan hidup).

Aspek sumber daya manusia akan sangat penting untuk dikaji sebab berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan pemerintah dapat diukur melalui kualitas sumber daya manusia yang ada (Tahar et al., 2022). Adanya

sumber daya manusia yang baik akan berdampak pada pembangunan dan diikuti dengan perkembangan sektor-sektor lainnya.

Menurut Sholihah & Firdaus (2019) bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik akan membentuk keterampilan dan *skill* pada masing-masing individu masyarakat yang secara masif akan berkembang. Hal inilah yang menjadi potensi bagi suatu daerah untuk dapat terus beradaptasi mengingat tingkat perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat, selalu beririsan langsung dengan perkembangan ekonomi, yang senantiasa membutuhkan peran serta dari masyarakat yang berkualitas, agar dapat memanfaatkan peran teknologi untuk meningkatkan ekonomi wilayah. Kontribusi dari masing-masing indikator Sektor Sosial pada setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kontribusi Indikator pada Sektor Sosial

Hasil yang diperoleh dari proses perhitungan dengan menggunakan teknik *scaling* pada sektor sosial, menunjukkan bahwa sektor sosial di Provinsi Bengkulu sebagian besar berada di tingkat perkembangan yang tinggi (wilayah maju). Terdapat 6 dari 10 wilayah administrasi di

Provinsi Bengkulu yang berada di klasifikasi tinggi (wilayah maju). Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan atau perkembangan wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu dari sektor sosial, sudah baik dalam proses pembangunannya dan cenderung merata. Wilayah dengan

klasifikasi rendah (wilayah tertinggal) hanya berada di Kabupaten Lebong, karena Kabupaten Lebong dari data yang diperoleh seperti; sisi jumlah penduduk, laju pertumbuhan, jumlah penduduk miskin dan angka harapan hidup. Data menunjukkan memiliki hasil perhitungan yang terendah dari keseluruhan wilayah

yang ada di Provinsi Bengkulu, sehingga di Kabupaten Lebong, perlu memperbaiki dan fokus memperbaiki atau mengembangkan dari sektor sosial perlu diperhatikan lebih jauh lagi. Hasil perhitungan dengan menggunakan teknik *scaling* dari sektor sosial di Tabel 3

Tabel 3. Hasil Perhitungan Tingkat Perkembangan Wilayah pada Sektor Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2023

| No | Kabupaten/Kota | Tingkat Perkembangan Wilayah | | | | | |
|----|------------------|------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|---------------|
| | | Sektor Sosial | | | | | Klasifikasi |
| | | Kependudukan | Pendidikan | Kesehatan | Total | Scaling Akhir | |
| 1 | Bengkulu Selatan | 49,96 | 33,28 | 46,26 | 129,51 | 61,01 | Sedang |
| 2 | Rejang Lebong | 78,24 | 33,75 | 34,46 | 146,46 | 70,14 | Tinggi |
| 3 | Bengkulu Utara | 100 | 14,22 | 43,63 | 157,86 | 76,28 | Tinggi |
| 4 | Kaur | 40,83 | 27,69 | 43,43 | 111,96 | 51,57 | Sedang |
| 5 | Seluma | 83,17 | 0,38 | 32,87 | 116,43 | 53,97 | Sedang |
| 6 | Mukomuko | 82,83 | 21,98 | 44,59 | 149,41 | 71,73 | Tinggi |
| 7 | Lebong | 0 | 16,20 | 0 | 16,20 | 0 | Rendah |
| 8 | Kepahiang | 55,59 | 29,33 | 74,57 | 159,49 | 77,16 | Tinggi |
| 9 | Bengkulu Tengah | 46,38 | 0 | 100 | 146,38 | 70,10 | Tinggi |
| 10 | Kota Bengkulu | 95,14 | 100 | 6,75 | 201,90 | 100 | Tinggi |

Keterangan:
0–33,34 (Rendah), 33,34–66,67 (Sedang), 66,67–100 (Tinggi)

Pembangunan menurut teori *threshold value* maupun teori perkembangan wilayah membutuhkan persyaratan tertentu berupa *stakeholder* (jumlah minimum penduduk pada suatu wilayah), sehingga permasalahan berkaitan dengan kependudukan di Kabupaten Lebong perlu diperhatikan lebih dalam oleh pemerintah pusat Provinsi dan daerah.

Threshold value ini berdampak besar pada perkembangan wilayah, jumlah penduduk yang sedikit ditambah lagi kondisi wilayah yang berasosiasi langsung dan dikelilingi oleh daerah-daerah dengan *threshold* yang lebih tinggi, berdampak pada ketergantungan baik dari segi

pemenuhan fasilitas penduduk maupun ketergantungan dari segi sumber daya. Dibutuhkan kemandirian wilayah untuk dapat meningkatkan pembangunan pada sektor sosial.

Tidak adanya daya tarik wilayah serta penduduk yang cenderung homogen apabila dibandingkan dengan daerah lain, menjadikan salah satu faktor mengapa Kabupaten Lebong memiliki pertumbuhan dan jumlah penduduk cenderung tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, angka migrasi masuk yang tidak melebihi angka migrasi keluar dan angka kematian juga berdampak pada stagnasi angka jumlah penduduk di Kabupaten Lebong.

Terdapat kenaikan penduduk hanya sebesar 801 jiwa atau kenaikan sekitar 0,7 persen menjadi sebanyak 112.982 jiwa (BPS, 2023). Selain itu, Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah baru dan masih dalam proses pembenahan dari segi infrastruktur baik kesehatan maupun pendidikan, dan peningkatan sumber daya. Hal ini didasarkan kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

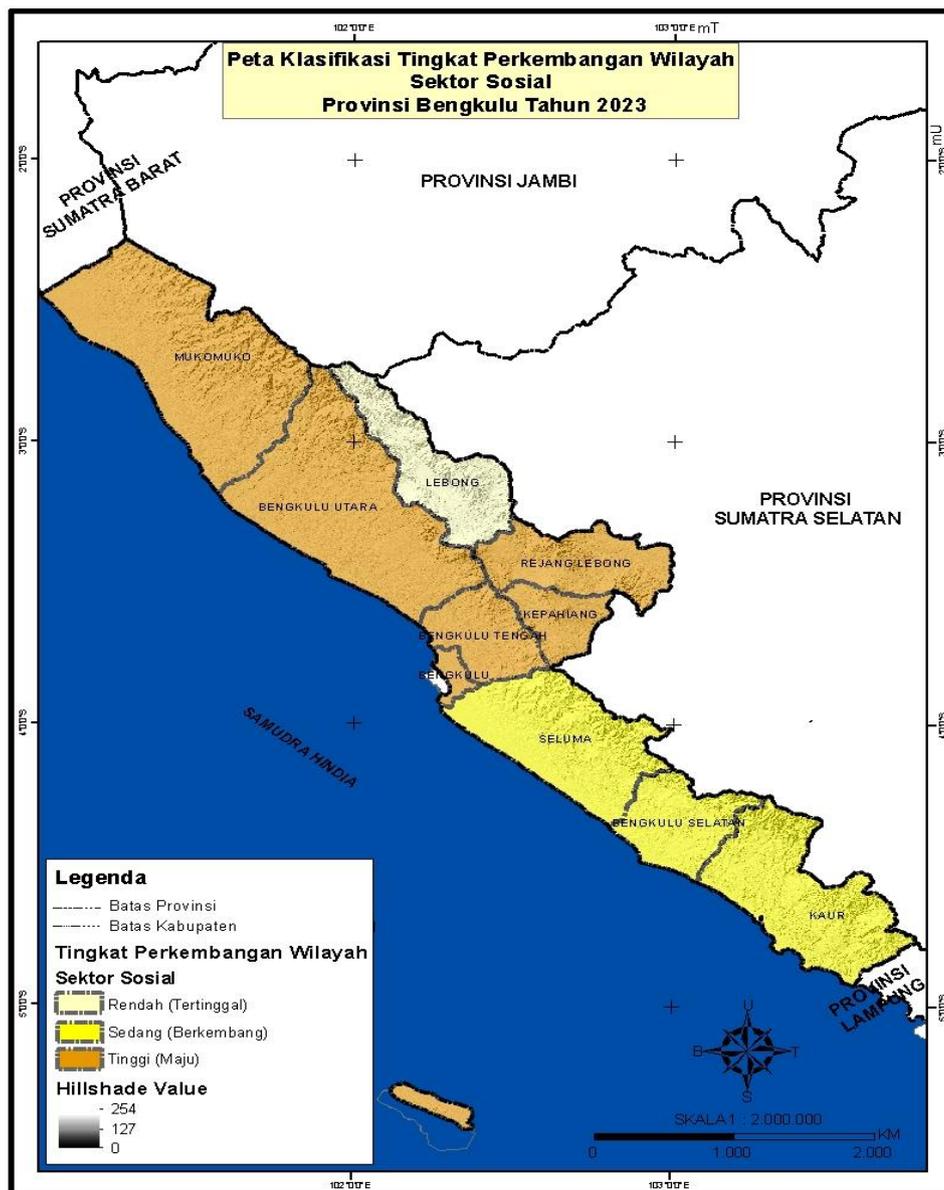
Daerah yang masuk ke dalam klasifikasi sedang diantaranya yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, dan Seluma. Ketiga Kabupaten ini memiliki rentan nilai antara 51 – 61. Apabila dilihat dari faktor pembentuk sektor, terdapat kondisi yang berbeda pada masing-masing daerah. Kabupaten Seluma cenderung memiliki kondisi pertumbuhan penduduk yang lebih baik, hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu terdapat pertumbuhan sebesar 2 persen pada tahun 2023 yang menjadikan jumlah penduduk sebanyak 214.955 jiwa (BPS, 2023). Namun, dari segi Pendidikan, yang dihitung dari angka melek huruf dan angka lama sekolah masih cenderung rendah yang hanya 0,38 berada pada posisi terendah kedua setelah Kabupaten Lebong. Kabupaten Seluma juga merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Hal ini menjadikan wilayah ini juga masih dalam proses pembangunan baik dari segi pemenuhan infrastruktur Pendidikan maupun Kesehatan, sehingga secara langsung berdampak pada kondisi harapan hidup dan angka melek huruf yang ada (Tri Putri & Almahmudi, 2020). Distribusi spasial wilayah berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan wilayah dari sektor sosial dapat dilihat pada Gambar 3.

Berdasarkan hasil distribusi yang ada, wilayah dengan klasifikasi tinggi (wilayah maju) cenderung berada pada wilayah bagian utara dari Provinsi Bengkulu, sedangkan wilayah dengan klasifikasi sedang (wilayah berkembang) berada pada bagian selatan dari Provinsi Bengkulu. Menurut Mauleny (2015) bahwa aglomerasi nilai tingkat perkembangan pada sektor sosial dipengaruhi oleh perkembangan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan. Kota Bengkulu yang merupakan wilayah dengan tingkat perkembangan paling tinggi dan merupakan pusat pertumbuhan menjadi magnet penting dan utama bagi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Luas wilayah dan kemudahan mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain juga berpengaruh langsung pada kondisi sosial masyarakat.

Wilayah dengan Klasifikasi Sedang maupun tinggi secara langsung mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Hal ini berdampak pada nilai dan pengaruh perkembangan juga cenderung merata untuk masing-masing tingkatan pada wilayah tersebut.

Sektor Ekonomi

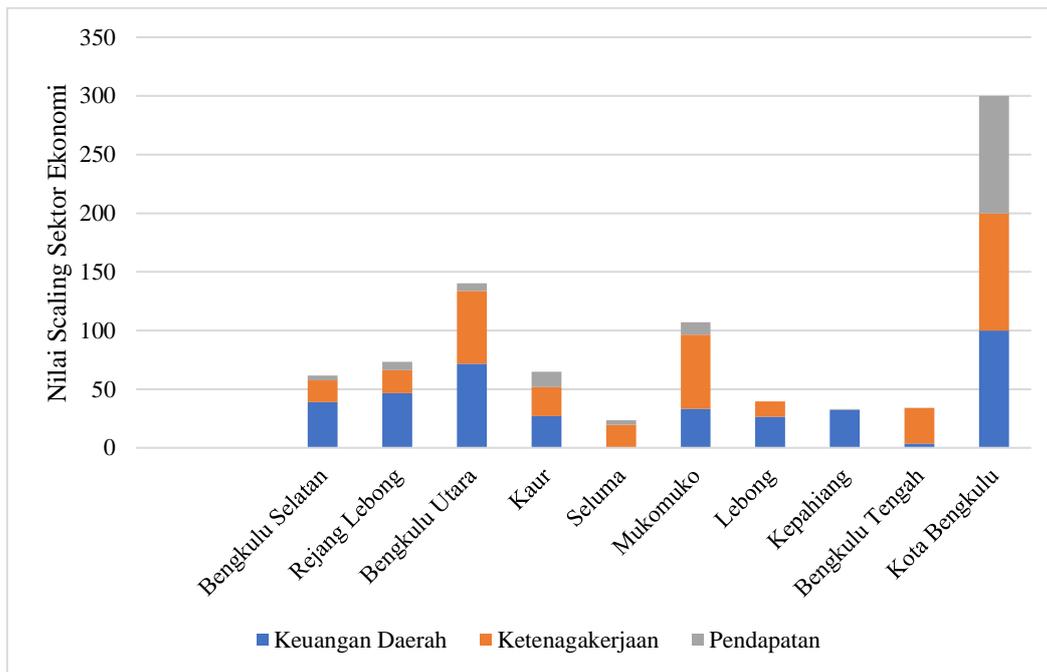
Sektor ekonomi merupakan sektor yang akan menunjukkan gambaran terkait dengan kondisi ekonomi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Sektor ini terdiri dari 3 indikator utama, yaitu; indikator Keuangan Daerah (PDRB, dan Laju pertumbuhan), kemudian indikator Ketenagakerjaan (Daya beli masyarakat, tingkat partisipasi, rata-rata gaji, dan pekerjaan non pertanian, dan terakhir indikator Pendapatan Daerah (Kontribusi sektor tersier dalam PDRB, dan nilai Investasi). Tujuan menggunakan data kontribusi tersier terhadap PDRB, karena wilayah yang maju kontribusi atau pendapatan PDRB akan di dominasi pada sektor tersier, tidak lagi tergantung pada sektor primer yang masih berkaitan dengan pemanfaatan lahan (alam).



Gambar 3. Peta Klasifikasi Tingkat Perkembangan Wilayah Sektor Sosial di Provinsi Bengkulu tahun 2023

Data-data yang diperoleh dari sektor ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu, kemudian dihitung dengan menggunakan teknik *scaling*. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkatan perkembangan wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu, didominasi oleh klasifikasi tingkat perkembangan rendah (wilayah tertinggal). Berdasarkan 10 wilayah administrasi di dalamnya, 8

diantaranya berada di tingkatan rendah (wilayah tertinggal), kemudian 1 diantaranya berada di tingkatan sedang (wilayah berkembang), dan satu 1 wilayah dengan perkembangan yang tinggi (wilayah maju). Kontribusi dari masing-masing indikator Sektor Ekonomi pada setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kontribusi Indikator pada Sektor Ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sektor ekonomi didominasi akan perkembangan wilayah yang masih rendah (wilayah tertinggal), dari indikator keuangan daerah dan pendapatan masih rendah, kemudian dari indikator ketenagakerjaan, masih didominasi akan sektor pertanian. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki klasifikasi perkembangan sedang (wilayah berkembang), dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yang ada di Provinsi Bengkulu, sedangkan wilayah yang memiliki tingkat perkembangan paling tinggi yaitu di Kota Bengkulu, karena Kota Bengkulu merupakan pusat pertumbuhan dari semua sektor yang ada di Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu belum bisa memberikan dampak yang signifikan untuk wilayah yang ada di sekitarnya, dilihat dari wilayah yang bersebelahan dengan Kota Bengkulu, yaitu; Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah, masih berada di klasifikasi dengan tingkat perkembangan yang rendah (wilayah tertinggal) Hasil perhitungan dengan menggunakan teknik scaling dari sektor sosial di Tabel 4.

Proporsi PDRB khususnya di Kota Bengkulu cenderung lebih variatif dengan nilai yang tinggi dibandingkan dengan daerah atau kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Selain itu, sektor tersier yang meliputi jasa juga didominasi dan terfokus/terkonsentrasi di Kota Bengkulu (BPS, 2023). Perkembangan sektor tersier tersebut juga berpengaruh pada tingkat pendapatan penduduk. Berdasarkan data BPS tahun 2023 terkait jumlah pendapatan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu memiliki pendapatan paling tinggi dengan nilai rata-rata ±Rp.1.858.000, dan disusul oleh Kabupaten Bengkulu Utara dengan rata-rata Rp. ±1.676.000 sedangkan untuk kabupaten lainnya memiliki nilai pendapatan yang lebih rendah. Hal ini menjadi faktor utama mengapa pada sektor ekonomi, Kota Bengkulu cenderung memiliki tingkat perkembangan paling tinggi, selain itu keberadaan berbagai fasilitas ekonomi baik berupa penyediaan layanan pinjaman, dan berbagai fasilitas ekonomi lainnya berdampak besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

yang ada (BPS, 2023). Distribusi spasial dan klasifikasi tingkat perkembangan wilayah pada sektor ekonomi yang ada di

Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 5.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Tingkat Perkembangan Wilayah pada Sektor Ekonomi di Provinsi Bengkulu Tahun 2023

| No | Kabupaten/Kota | Tingkat Perkembangan Wilayah Ekonomi | | | | | Klasifikasi |
|----|------------------|--------------------------------------|------------------|------------|-------|---------------|-------------|
| | | Dimensi Ekonomi | | | | | |
| | | Keuangan Daerah | Ketenag-akerjaan | Pendapatan | Total | Scaling Akhir | |
| 1 | Bengkulu Selatan | 39,01 | 18,43 | 4,09 | 61,5 | 13,71 | Rendah |
| 2 | Rejang Lebong | 46,62 | 19,66 | 7,11 | 73,4 | 18,00 | Rendah |
| 3 | Bengkulu Utara | 71,65 | 62,05 | 6,64 | 140,3 | 42,23 | Sedang |
| 4 | Kaur | 27,13 | 24,81 | 12,89 | 64,8 | 14,90 | Rendah |
| 5 | Seluma | 0 | 19,80 | 3,84 | 23,6 | 0 | Rendah |
| 6 | Mukomuko | 33,32 | 63,05 | 10,77 | 107,1 | 30,22 | Rendah |
| 7 | Lebong | 26,50 | 13,08 | 0 | 39,5 | 5,76 | Rendah |
| 8 | Kepahiang | 32,27 | 0 | 0,70 | 32,9 | 3,37 | Rendah |
| 9 | Bengkulu Tengah | 3,72 | 30,07 | 0,40 | 34,2 | 3,82 | Rendah |
| 10 | Kota Bengkulu | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | Tinggi |

Keterangan:
0–33,34 (Rendah), 33,34–66,67 (Sedang), 66,67–100 (Tinggi)

Adanya tren urbanisasi juga berdampak pada tingkat perkembangan wilayah pada sektor ekonomi. Urbanisasi ke Kota Bengkulu yang terjadi semakin memperkuat dan peningkatan jumlah angka tenaga kerja non pertanian, serta peningkatan nilai belanja masyarakat, namun secara langsung juga meningkatkan kesenjangan dan angka ketimpangan wilayah menjadi lebih jauh antara wilayah yang maju dengan wilayah yang tertinggal (Rijal & Tahir, 2022).

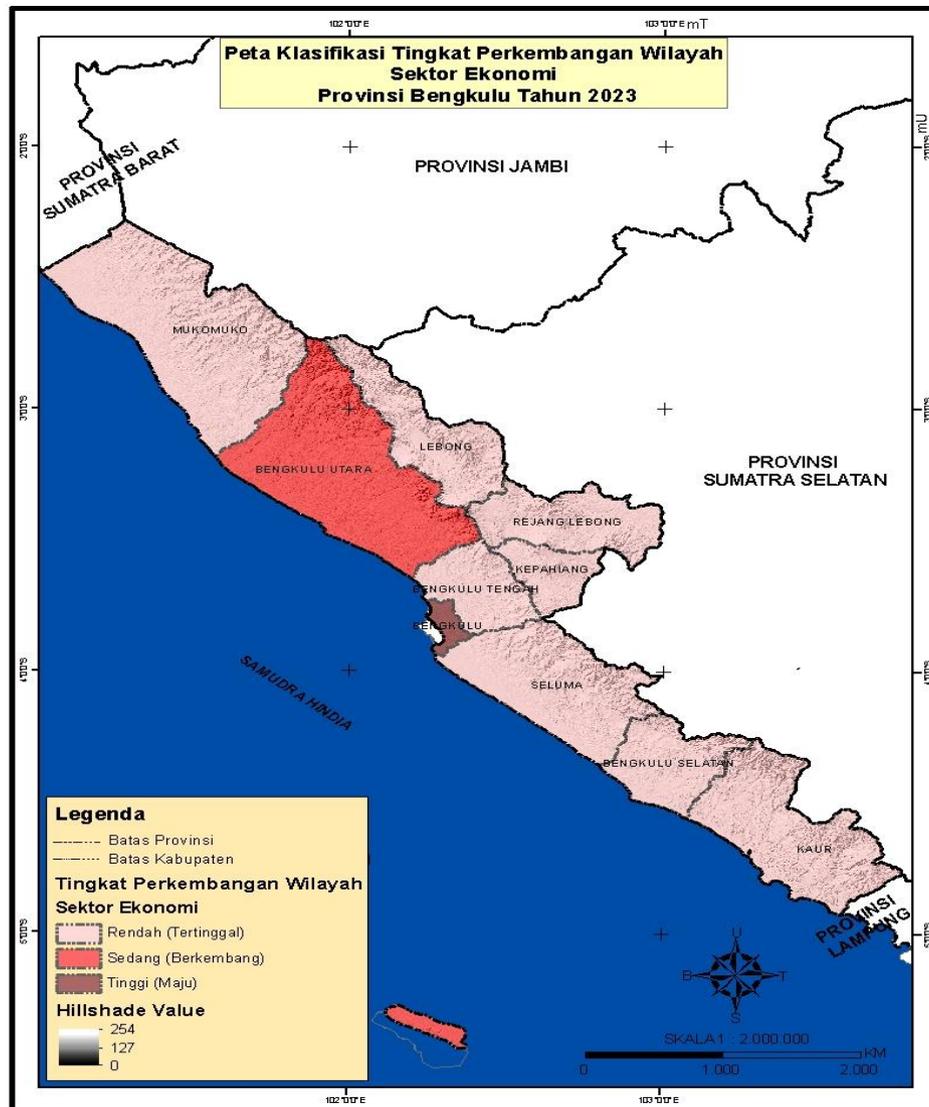
Kondisi sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap pendapatan atau keadaan dari sektor ekonomi. Provinsi Bengkulu yang didominasi oleh pertanian dan sebagian wilayah pesisir menjadikan daerah di Provinsi Bengkulu cenderung memiliki tingkat pertumbuhan PDRB yang cenderung konstan dan tidak terlalu signifikan sebab mengikuti harga pasar global (Indraswanti dkk., 2023). Peran komoditas sawit, aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya juga menjadi mata pencaharian masyarakat selain di sektor

pertanian dan kelautan. Sektor tersebut menjadi penyumbang utama dalam PDRB Provinsi Bengkulu khususnya bagi kabupaten-kabupaten yang ada, seperti Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Sleuma.

Asosiasi dengan provinsi lain seperti Provinsi Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Barat dan Jambi, menjadikan Provinsi Bengkulu tidak dapat bersaing sebab keempat provinsi di sekitarnya memiliki sumberdaya dan tingkat produktivitas sumberdaya yang lebih tinggi dan variatif. Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang (pendahuluan) bahwa Provinsi Bengkulu merupakan wilayah *Landlock*, wilayah yang berada di pesisir berbatasan dengan samudra dan dikelilingi dengan wilayah atau Provinsi yang memiliki perkembangan yang lebih baik. Rendahnya hasil dari produktivitas berdampak pada perkembangan produk turunan yang masih lambat, hal ini berdampak langsung pada ketersediaan

lapangan kerja yang cenderung rendah apabila dibandingkan dengan provinsi lain. Migrasi penduduk dan mobilisasi

penduduk juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah (Firman & Mustakim, 2020).



Gambar 5. Peta Tingkat Perkembangan Wilayah Sektor Ekonomi di Provinsi Bengkulu tahun 2023

KESIMPULAN

Pembangunan akan terkait dengan perkembangan wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu dari sektor Sosial, sudah cukup merata dalam proses pembangunannya. Hasil dari sektor sosial menunjukkan bahwa sebagian besar di Provinsi Bengkulu berada di klasifikasi atau tingkatan sedang (wilayah

berkembang), tersebar di wilayah administrasi 8 (Kabupaten). Terdapat satu wilayah dengan klasifikasi rendah (wilayah tertinggal) yang terjadi di Kabupaten Lebong, dengan indikator kesehatan dan kependudukan yang menunjukkan hasil 0 (terendah). Indikator kesehatan dan kependudukan terdiri dari

beberapa variabel, seperti; angka harapan hidup, penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Lebong, memiliki angka harapan yang tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya, kemudian juga di Kabupaten Lebong memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi dibandingkan dengan wilayah Kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu.

Sektor ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa sebagian besar masih berada di klasifikasi rendah (wilayah tertinggal). Variabel-variabel di dalamnya seperti pendapatan daerah (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, rata-rata upah, dan daya beli masyarakat yang masih rendah. 8 wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi rendah

(wilayah tertinggal), seperti; Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kaur, Seluma, Lebong, Kepahiang, Mukomuko dan Bengkulu Tengah. Wilayah dengan klasifikasi sedang, hanya terjadi di satu wilayah Kabupaten, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang terjadi termasuk ke dalam kelas wilayah berkembang. Wilayah dengan klasifikasi sedang (wilayah berkembang) berada di Kabupaten Bengkulu Utara. Kota Bengkulu mendominasi dengan klasifikasi yang tinggi (wilayah maju) dari kedua sektor ekonomi dan sosial, hal tersebut dikarenakan Kota Bengkulu menjadi pusat pertumbuhan dan pertumbuhan satu-satunya yang ada di Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, T. N., & Srimarchea, D. W. (2023). Handling of Undeveloped Areas in Indonesia. *Khazanah Intelektua*, 7(1), 1584–1600.
<https://doi.org/10.37250/newkiki.v41.185>
- Bawono, I.R. (2019). *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Jakarta. (Ed.; 1st ed). Grasindo.
- BPS. (2023). *Provinsi Bengkulu dalam Angka Tahun 2023*. (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Ed: 1nd ed.).
- BPS. (2023). *Kabupaten Lebong dalam Angka Tahun 2023*. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong, Ed: 1nd ed.)
- BPS. (2023). *Kabupaten Seluma dalam Angka Tahun 2023*. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, Ed: 1nd ed.)
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(1).
- Firman, A., & Mustakim. (2020). Gerak Migrasi Penduduk Pesisir Implikasinya terhadap Ekonomi (wilayah tertinggal), seperti; Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kaur, Seluma, Lebong, Kepahiang, Mukomuko dan Bengkulu Tengah. Wilayah dengan klasifikasi sedang, hanya terjadi di satu wilayah Kabupaten, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang terjadi termasuk ke dalam kelas wilayah berkembang. Wilayah dengan klasifikasi sedang (wilayah berkembang) berada di Kabupaten Bengkulu Utara. Kota Bengkulu mendominasi dengan klasifikasi yang tinggi (wilayah maju) dari kedua sektor ekonomi dan sosial, hal tersebut dikarenakan Kota Bengkulu menjadi pusat pertumbuhan dan pertumbuhan satu-satunya yang ada di Provinsi Bengkulu.
- Kependudukan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 9(2), 2354–7693.
<http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>.
- Indraswanti, B. I. E., Sunoto, & Gunawan, R. (2023). Peran Komoditas Sawit Pada Perekonomian Provinsi Bengkulu. *Convergence: The Journal Of Economic Development*, 5(1), 45–61.
<https://ekonomi.bisnis.com>.
- Hukom, A., Saraswati, D., Nasir, D., Ka'arieni, Kusin, K., Virgiyanti, L., Yulianti, N., Nomeritae, Kristhy, M. E., Ravenalla, Abdurrahman Al Hakim, Sampurna Putra S., Rendy Muhamad Iqbal, & Salampak Dohong. (2023). *Menapak Jejak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (N. Yulianti, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Deepublish.
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2020). *Meta Data Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs Indonesia* (A. Rudiyanto, Ed.; 2nd ed.).

- Mauleny, A. T. (2015). Agglomeration, Socio-Economic Changes, and Development Policy of Jakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(2), 147–162.
- Muta'ali, Lutfi., (2000). *Teknik Analisis Regional, Handout untuk Mata Kuliah Teknik Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Yogyakarta. Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Rijal, S., & Tahir, T. (2022). Analisis Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Wilayah Kota Makassar). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(1), 262–276. <https://ojs.unm.ac.id/JE3S>.
- Saleh, H., Surya, B., Ahmad, D. N. A., & Manda, D. (2020). The role of natural and human resources on economic growth and regional development: With discussion of open innovation dynamics. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 1–23. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040103>.
- Saputro, R. (2022). Identifikasi Tingkat Perkembangan Wilayah di Provinsi Bengkulu. *Thesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), 62–74. <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/download/323/139>.
- Sholihah, I., & Firdaus, Z. (2019). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Jurnal Al-Hikmah*, 7(2), 33–46. <https://jurnal.badrussholeh.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/97>.
- StiRRRD. (2015). *Profil Kota Bengkulu - Kerentanan Bencana Alam*. <https://stirrrd.wg.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1286/2014/11/bengkulu-city-natural-disaster-vulnerability-profile-bahasa.pdf>.
- Suhendra, I., Istikomah, N., Ginanjar, R. A. F., & Anwar, C. J. (2020). Human Capital, Income Inequality and Economic Variables: A Panel Data Estimation from a Region in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 571–579. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.v07.no10.571>.
- Tahar, A., Setiadi, P. B., Rahayu, S., Stie, M. M., & Surabaya, M. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12380–12394.
- Tri Putri, N., & Almahmudi, A. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Bengkulu (Telaah Posisi 3 Kabupaten Induk). *Convergence : The Journal Of Economic Development*, 2(1), 70–90. <https://ejournal.unib.ac.id/convergence-jep/article/view/12075/5989>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu